STRATEGI LEMBAGA PARISADA DALAM PENEGAKAN HUKUM HINDU DI TENGAH INTERAKSI SOSIAL MASYARAKAT KECAMATAN BASARANG KABUPATEN KAPUAS

I Made Kastama

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

kastamaimade@gmail.com

Abstract

This type of research was qualitatively descriptive with the objective for analyzing the strategies carried out by the Parisada institution in Hindu law enforcement in the midst of social interaction of the people of Basarang sub-district of Kapuas Regency. The informant in this study was the administrator of Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Basarang sub-district. This research was conducted by means of in-depth interviews and the data obtained was analyzed and described in the form of words. The conclusion of this research was that the strategy of the Parisada institution in the enforcement of Hindu Law in the midst of social interaction in Basarang District of Kapuas Regency was carried out in an organizational approach by demonstrating its role as a supervisory institution and community organizer with its authority to enforce Hindu law with restrictions on the Articles of Association of Parisada Province and Central Parisada. Activities applied to all activities of Hindu society referred to the constitutionalized Hindu Law in *awig-awig*. Arrangements in marriage, arrangements in *yadnya* arrangements in divorce, arrangements in inheritance and other issues were regulated by *awig-awig* as legal guidelines sourced from the Vedas and *Manawadharma literature*. The strategy of the Parisada institution in resolving the problem of violations of Hindu law, if the violation entered the realm of custom, then Parisada as a partner of the Customs Council in resolving the problem by mediating it. Parisada as a partner of Kelihan Adat in resolving problems through mediation. If in solving the problem Kelihan adat cannot solve it, then the problem was delegated to Parisada to resolve it with the authority to be in the Parisada institution to resolve it until a decision was made by the Parisada institution with a strategy of deciding cases based on Hindu legal considerations.

Keywords; Parisada Institution, Hindu Law and Social Interaction

Abstrak

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan lembaga Parisada dalam penegakan hukum Hindu di tengah interaksi sosial masyarakat kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas. Informan dalam penelitian ini adalah pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Basarang. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam dan data yang didapatkan dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata. Simpulan dari penelitian ini yaitu strategi lembaga Parisada dalam penegakan Hukum Hindu di tengah interaksi sosial di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas adalah dilakukan dengan cara pendekatan secara organisasional dengan menunjukkan perannya sebagai lembaga pembina dan pengayom umat dengan kewenangannya untuk menegakkan hukum Hindu dengan batasan pada Anggaran Dasar Parisada Provinsi dan Parisada Pusat. Kegiatan yang diterapkan pada semua aktivitas masyarakat Hindu merujuk pada Hukum Hindu yang konkretisasi dalam awig-awig. Pengaturan dalam perkawinan, pengaturan dalam yadnya pengaturan dalam perceraian, pengaturan dalam pewarisan dan masalah lainnya diatur dengan *awig-awig* sebagai pedoman Hukum yang bersumber dari Weda dan *Manawadharma sastra*. Strategi lembaga Parisada dalam menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap hukum Hindu, apabila pelanggaran masuk ke ranah adat, maka Parisada sebagai mitra Kelihan Adat dalam penyelesaian masalah dengan memediasinya. Apabila dalam penyelesaian masalah Kelihan adat tidak dapat menyelesaikan, maka permasalahan tersebut dilimpahkan kepada Parisada untuk menyelesaikannya dengan kewenangan berada di lembaga Parisada untuk menyelesaikannya sampai adanya putusan yang ditetapkan oleh lembaga Parisada dengan strategi memutus perkara dengan dasar pertimbangan hukum Hindu.

Kata Kunci; Lembaga Parisada, Hukum Hindu dan Interaksi Sosial

I. Pendahuluan

Pergaulan hidup dan perkembangan jaman tidak bisa kita hindari, mau nggak mau kita harus mengikuti arus globalisasi yang mengarah ke perubahan sosial masyarakat. Sebagai umat Hindu/Hindu Kaharingan harus mampu mengikuti perkembangan jaman ingin hidup damai, memegang azas berkeadilan, berakhlak mulia

serta cinta pada tanah air sebagaimana layaknya kita sebagai warga negara. Cinta terhadap tanah air tersebut diwujudkan melalui kesadaran untuk adanya keseimbangan makhluk hidup di dunia, sehingga setiap masyarakat Hindu mempunyai kesadaran hubungan antara manusia dengan Penciptanya, dengan alam lingkungannya dan dengan sesamanya juga keselarasan antara tujuan hidup secara fisik dengan kebahagiaan rohani.

Masyarakat Hindu yang berada di Kecamatan Basarang tidak bisa terlepas dari adanya perselisihan dan ketidaksepahaman dalam pergaulan dan interkasi sosial hidup dalam hubungan sosial kemasyarakatan, sehingga diperlukan solusi penyelesaiannya. Untuk mendukung kehidupan masyarakat diperlukan norma Hukum Hindu sebagai landasan dan payung hukum untuk menghindari terjadinya benturan/konflik sebagai akibat dari berbagai ragam kepentingan kebutuhan hidup manusia dalam masyarakat. Penegakan Hukum Hindu diperlukan kemampuan dan strategi dalam mengimplementasikan kekuatan Hukum Hindu dalam masyarakat, tantangan dan tuntutan kemampuan personil lembaga Parisada sangat diperlukan dalam hal ini. Norma hukum Hindu sangat diperlukan oleh masyarakat Hindu sebagai acuan dan bagaimana bertindak dan hidup bermasyarakat agar terarah dan sistematis dalam koridor aktivitas masyarakat Hindu. Penerapan norma hukum Hindu oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia kecamatan Basarang sangat menentukan dalam penegakan ketentraman dan kenyamanan, serta kesebandingan hukum bagi masyarakat terutama masyarakat yang sering menghadapi problem sebagai akibat kebutuhan hidup yang sangat memerlukan perlindungan kepentingan manusia tersebut. Masyarakat Hindu yang berdomisili di Kecamatan basarang dalam pergaulan masyarakat dengan latar belakang sosial masyarakat yang beragam, masyarakat yang majemuk, dengan perilaku yang berbeda karena aturan norma yang berlainan. Hal ini tidak menutup

kemungkinan akan terjadi perselisihan dan kesenjangan sebagai akibat terjadinya kemajemukan sosial.

Hubungan yang saling mengerti dan memahami norma hukum lainnya dengan sifat kegotongroyongan sangat diperlukan dalam hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan sosial setiap anggota masyarakat dituntut untuk dapat hidup bergaul dengan anggota masyarakat lainnya. Namun hubungan tersebut dapat tidak harmonis akibat adanya komunikasi yang keliru dengan pemahaman yang berbeda yang mengarah pada terjadinya perselisihan paham. Disinilah diperlukan kemampuan Pengurus Parisada menghadapi perubahan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu menggerakkan tingkah laku atau mencapai keadaan yang dikehendaki.

Kehidupan bermasyarakat tentu tidak pernah lepas dari sebuah aturan. Aturan hadir guna membatasi tindakan atau perilaku yang dapat mengganggu hak-hak orang lain. Dalam pergaulan bermasyarakat, sikap saling menghormati dan menghargai merupakan etika yang harus tetap dijunjung tinggi. Sebagaimana pandangan Pound (Kurnia, 2016) menyatakan bahwa hukum lebih pada suatu ideal, nilai, tentang keharusan (norma/kaidah) dalam rangka penataan suatu masyarakat. Ideal atau nilai di sini mempresentasikan tujuan sangat kuat yang hendak direalisasikan di dalam keharusan tersebut yaitu keadilan. Keadilan adalah sinonim dari hukum termasuk Hukum Hindu.

Keberadaan hukum Hindu yang ditegakkan dan dilaksanakan oleh lembaga agama Hindu yaitu Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Berdasarkan Hukum Hindu pelaksanaan Agama Hindu sebagai salah satu agama yang ada di Indonesia memiliki kelembagaan untuk mengatur, mengarahkan, mengayomi dan mewadahi segala kegiatan masyarakat Hindu agar terkoordinir dengan baik. Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia yang disingkat PHDI, baik PHDI tingkat Pusat,

PHDI tingkat Provinsi, PHDI tingkat kota/kabupaten sampai pada PHDI tingkat Kecamatan. Khusus di Kalimantan Tengah kepengurusan lembaga keagamaan lebih dikenal dengan nama Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan Pusat (MB-AHK) untuk tingkat provinsi, Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD-AHK) untuk tingkat kabupaten dan Majelis Resort Agama Hindu Kaharingan (MR-AHK) untuk tingkat kecamatan.

Parisada Hindu Dharma Indonesia maupun Majelis Agama Hindu Kaharingan sebagai lembaga agama harus mampu dan lebih banyak bergerak di bidang sosial keagamaan memberikan perlindungan kepada umat agar dalam masyarakat bisa segala aktivitas dapat berjalan dengan baik. Lembaga PHDI sebagai lembaga sosial keagamaan sebagai wadah yang memiliki aturan atau norma-norma agama yang diterapkan dan diharapkan dapat melestarikan, menjunjung dan menjaga kelestarian hidup sosial keagamaan masyarakat penganutnya. Lembaga agama baik PHDI maupun MB-AHK sebagai lembaga agama yang juga bergerak di bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan arah, kebijakan dan peraturan yang secara terus menerus dijadikan pedoman oleh umatnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku individu maupun perilaku kelompok baik secara sadar maupun tidak sadar setiap warga masyarakatnya wajib mentaati peraturan tersebut.

Di bawah binaan Lembaga agama PHDI dan MB-AHK tersebut masyarakat harus mampu berinteraksi sosial dengan masyarakat lainnya sebagai akibat modernisasi sehingga diperlukan kaidah hukum Hindu yang mampu memahami dan melindungi kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan kesadaran masyarakat Hindu. Kaidah Hukum Hindu inilah dijadikan sumber hukum agama Hindu dalam bertingkah laku disetiap pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara, hal ini perlu ditelusuri apakah Hukum Hindu benar-benar ditaati oleh setiap orang juga sebagai subyek hukum. Dari

pandangan hukum, pada umumnya setiap manusia adalah cakap bertindak sesuai dengan aturan hukum, sehingga manusia sering dikatakan sebagai subyek hukum adalah seseorang yang mempunyai kewenangan melaksanakan hak dan kewajiban secara mandiri.(Nugroho, 2017) Manusia yang cakap hukum tersebut harus mampu berinteraksi dalam tindakan sosial yang berhadapan dengan berbagai macam tingkah laku dan aturan hukum. Tindakan sosial tidak terjadi jika tidak disertai oleh kontak dan komunikasi sosial. Tindakan sosial merupakan suatu gerakan atau tindakan nyata yang diarahkan kepada orang lain, tindakan yang bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu (Ritzer, n.d.).

Dalam interaksi sosial masyarakat Hindu di Kecamatan Basarang tidak luput dari adanya pengaruh yang dapat mengarah kepada perubahan sosial masyarakat. Perubahan itu bisa terjadi dalam masyarakat apakah perubahan dalam struktur, sistem dan organisasi sosial yang ada, sebagai akibat adanya pembauran pola hidup manusia yang dipengaruhi oleh adanya faktor kebutuhan. Hukum juga dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat, ketika hukum dikatakan sebagai sarana rekayasa sosial (social engineering) adalah penggunaan hukum untuk mencapai tertib sosial masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan (Adi, 2016).

Sebagai umat Hindu wajarlah bilamana persoalan yang berhubungan dengan aturan Hukum Hindu mendapatkan perhatian khusus, disamping itu, memang sudah saatnya kalau para cendekiawan, akademisi dan pemerhati hukum Hindu/Hindu Kaharingan melaksanakan penelitian terkait dengan Keberadaan Hukum Hindu/Hindu Kaharingan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti berminat untuk menggali dan meneliti tentang bagaimana strategi Lembaga Parisada dalam Penegakan

Hukum Hindu di Tengah Interaksi Sosial Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas.

II. Metode

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi lembaga Parisada dalam penegakan Hukum Hindu di tengah interaksi sosial masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menguraikan data dengan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan wilayah penelitian atau populasi relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif. (Fuady, 2018). Penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkenaan dengan fenomena penelitian atau penelitian yang bermaksud untuk mengadakan dan pengumpulan data pendekatan individu secara utuh, menelaah dan memahami sikap, pandangan dan perilaku orang pada suatu konteks khusus. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari suatu fenomena sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat dan waktu (Satori & Komariah, 2014).

Penentuan lokasi terhadap penelitian ini dilakukan di Kecamatan Basarang kabupaten Kapuas dengan pertimbangan dimana lokasi ini memiliki adat istiadat serta nilai-nilai penerapan hukum Hindu yang mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Lokasi Penelitian ditetapkan secara purposive berdasarkan kriteria yaitu Desa yang memiliki interaksi sosial yang kuat dalam mempertahankan hubungan dalam masyarakat. Pemilihan sampel sebagai suatu pengamatan memperhatikan sejumlah kriteria, yang bermaksud menjangkau informasi sebagai sumber data. Melalui sampel ini peneliti menggali informasi yang menjadi dasar

rancangan permasalahan bahwa Ketua PHDI (Parisada) mempunyai wewenang untuk mengatur hubungan masyarakat.

Agar data penelitian dapat dideskripsi, dianalisis dan diinterpretasi, diperlukan data yang memadai, diperlukan alat atau instrumen pengumpulan data. Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan validitas dan reliabilitasnya, pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan pada waktu menyusun instrumen pengumpulan yaitu instrumen itu harus memuat jenis-jenis indikator (variabel) yang relevan dan memadai dari segi kualitas. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data agar mendapatkan data valid yang memahami bidang yang diteliti, sehingga peneliti adalah merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono, 2010). Wawancara dilakukan untuk dapat mengumpulkan data yang valid dengan menggali data selengkap-lengkapunya tidak saja tentang apa yang diketahui, apa yang dialami informan dan responden penelitian tetapi juga apa yang ada dibalik pandangan, pendapat dan atas perilaku yang terobservasi. Oleh karena itu instrumen, pedoman wawancara dan alat bantu seperti tape recorder untuk perekaman suara, dipersiapkan secara optimal sebelum wawancara dilakukan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Hikmawati, 2019).

III. Pembahasan

Strategi Lembaga Parisada Dalam Penegakan Hukum Hindu di Tengah Interaksi Sosial Masyarakat di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas

Strategi pada prinsipnya berkaitan dengan persoalan kebijakan pelaksanaan, penentuan tujuan, penentuan sarana-sarana, penentuan cara-cara atau metode

penggunaan sarana tersebut (Suryono, 2020). Strategi lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga majelis tertinggi bagi umat Hindu yang berada di wilayah Indonesia, memiliki tanggung jawab yang begitu besar demi pengembangan keagamaan Hindu. Lembaga Parisada dengan membuat kebijakannya harus mampu mengemban tugasnya dengan memupuk, memelihara, menjaga, melindungi serta mengembangkan ajaran agama Hindu agar tetap langgeng dan berjalan sesuai aturan Hukum Hindu dengan menjalankan Dharma Negara dan Dharma Agamanya di tengah interaksi sosial. Interaksi sosial adalah tindakan dua orang atau lebih, setiap perilaku mencoba mempengaruhi atau memperhitungkan pengalaman subjektif atau niat masing-masing (Jacky, 2015). Pengurus Parisada melakukan tindakan penegakan Hukum Hindu dengan mempengaruhi orang lain dalam interaksi untuk mentaatinya. Memperhatikan tugas dan tanggung jawab lembaga Parisada yang begitu berat namun mulia, peneliti dapat menguraikan hasil penelitian dengan beberapa indikator yang dapat peneliti sajikan.

1. Peran Lembaga Parisada Dalam Penegakan Hukum Hindu di Tengah Interaksi Sosial Masyarakat.

Perilaku anggota masyarakat memanasifestasikan keteraturan lahiriah tertentu, terutama dalam hubungannya dengan sesamanya. Keteraturan tersebut nampaknya dikondisikan secara organisasi dan merupakan ciri manusia yang paling primer (Praja, 2014). Di tengah Interaksi sosial dengan arus globalisasi yang begitu deras lembaga Parisada dituntut untuk tetap dapat eksis dan konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan abdi agamanya dalam mengembangkan dan menegakkan ajaran dan aturan Hukum Hindu agar tidak terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam melaksanakan ajaran agama dan aturan hukum agama yang sudah dijadikan dasar dan pedoman dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat bagi masyarakat Hindu.

Pengurus Parisada kecamatan Basarang selalu berkoordinasi antar Banjar Adat terkait dengan pelaksanaan dan secara umum ada kesesuaian kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan keagamaan dan kegiatan sosial masyarakat Hindu. Parisada selama ini dalam penegakan aktivitas dan penegakan hukum Agama Hindu dengan mensosialisasikan dan berkordinasi dengan tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat adat. Memperhatikan penjelasan tersebut strategi lembaga Parisada dalam penegakan hukum Hindu dilakukan dengan menggunakan pendekatan organisasional dengan cara berkoordinasi. Koordinasi ini penting dilakukan oleh lembaga Parisada sebagai lembaga yang mengayomi organisasi-organisasi masyarakat Hindu yang berada dibawahnya. Koordinasi dilakukan kepada para tokoh pemuda dalam rangka sama-sama melaksanakan pembinaan kepada umat terutama kepada generasi muda Hindu agar tetap eksis dalam menjalankan dharma agamanya. Penegasan Ketua Parisada selalu memberikan sosialisasi untuk dapat menjalankan kewajiban sebagai umat Hindu dan juga mensosialisasikan tentang aturan Hukum Hindu agar masyarakat Hindu tetap mentaatinya apa yang ada didalam hukum Hindu seperti dalam Weda, *Manawadharmasastra* dan *Bagawadghita* sebagai acuan dalam melaksanakan kewajiban sebagai umat Hindu.

Pentingnya pemahaman terhadap pedoman dan aturan ajaran agama Hindu memberikan peluang dan harapan bagi masyarakat Hindu untuk menjadi umat yang taat serta memiliki sradha dan bhakti kepada ajaran Hyang Widi dengan melaksanakan semua ajaran dan petunjuk yang ada dalam kitab Suci. Lembaga Parisada mengharapkan seluruh umat Hindu taat pada ajaran dan petunjuk agama Hindu sebagai lampu penerang dalam kehidupan sebagai manusia di dunia, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak baik, taat pada ajaran dan petunjuk agama menjadikan masyarakat Hindu memiliki jiwa sradha dan bhakti yang dilakoni setiap hari tanpa

merasa lelah dan jenuh bahkan merasa sebagai suatu kewajiban yang dapat dilaksanakan secara tulus ikhlas. Kegiatan yang dilakukan dengan cara bekerjasama dalam bentuk gotong royong *ngayah* dalam kegiatan sosial keagamaan, sudah ditanamkan sejak dini oleh lembaga Parisada dengan memberikan pembinaan sebagai tugas dan peran lembaga Parisada dalam pembinaan umat Hindu. Parisada menginginkan masyarakat Hindu pada taat pada ajaran agama Hindu serta mentaati aturan hukum yang ada terutama aturan Hukum Hindu sebagai peraturan yang memberikan pedoman dan petunjuk agar semua kegiatan terarah sesuai dengan tujuan bersama serta sesuai dengan ajaran yang ada pada Weda sebagai kitab suci yang sebagai sumber hukum yang tertinggi bagi umat Hindu.

Lembaga Parisada mempunyai peran dalam hal memajukan kehidupan sosial kemasyarakatan Hindu di wilayah yang mereka pimpin, termasuk juga mempunyai peran untuk menegakkan aturan/norma hukum agama Hindu. Lembaga Parisada menginginkan organisasi yang dipimpinnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan norma hukum Hindu. Disinilah peran penting Parisada dalam hal mensosialisasikan aturan-aturan hukum yang semestinya harus ditaati oleh semua lapisan masyarakat Hindu sebagai strategi dalam penegakan Hukum Hindu dilakukan dengan pendekatan pembinaan.

Peran Parisada sangat penting mempengaruhi dalam hal interaksi sosial masyarakat untuk penegakan norma Hukum Hindu yang menjadikan dasar dan rambu-rambu dalam beraktivitas dan bertindak, masyarakat Hindu diarahkan untuk dapat mentaati aturan hukum agar keseimbangan, keharmonisan dan keadilan dapat berjalan dan terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial masyarakat diwujudkan melalui interaksi anggota masyarakat dalam kelompok *banjar adat* dilakukan dengan cara bersama-sama dalam suatu aktivitas (Kastama, 2020). Peran

lembaga Parisada dalam penegakan Hukum Hindu sudah dilakonimya dari jaman dulu sampai sekarang dari generasi ke generasi penegakan Hukum Hindu sebagai upaya untuk mendisiplinkan kreativitas masyarakat Hindu sesuai dengan harapan dan kesepakatan untuk selalu bhakti dan taat pada kegiatan upacara agama Hindu, begitu juga terhadap kehidupan masyarakat Hindu dalam hal hubungannya dengan kesedapan hidup bersama yang dibatasi dengan peraturan hukum Hindu agar tidak terjadi kebebasan di luar prosedur. Kebebasan yang dilakukan dalam arti bebas untuk melaksanakan upacara keagamaan tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak luar, sehingga upacara dapat berjalan dengan lancar. Lancarnya kegiatan sosial keagamaan tidak terlepas dari peran penting lembaga Parisada untuk menciptakan keadaan yang harmonis. Hormatnya masyarakat Hindu terhadap aturan Hukum Agama Hindu merupakan suatu kesuksesan bagi peran lembaga Parisada dalam melaksanakan tugasnya untuk menciptakan kegiatan keagamaan yang kondusif serta dapat berjalan sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Lembaga Parisada sebagai lembaga tertinggi dalam agama Hindu berhak untuk menentukan lancar dan suksesnya organisasi tersebut di bawah kepemimpinan ketua Parisada yang memiliki hak untuk menegakkan Hukum Hindu dan memiliki kewajiban untuk menegakkannya agar masyarakat Hindu dapat beraktivitas sesuai dengan apa yang diharapkan. Cara pembinaan yang dilakukan kepada umat Hindu dengan beberapa media seperti kegiatan *Dharmawacana* pada hari besar agama Hindu, pertemuan di *Balai Banjar* dan pembinaan di sekolah-sekolah dengan harapan generasi muda sejak dini sudah membiasakan diri memahami, mengikuti dan menjalankan aturan Hukum Hindu sehingga timbul pembiasaan untuk taat pada aturan.

2. Kewenangan Lembaga Parisada Dalam Penegakan Hukum Hindu

Kewenangan yang dimiliki pimpinan organisasi termasuk pimpinan lembaga Parisada sebagai hak untuk melakukan sesuatu kepada orang lain dengan cara memerintahkan kepada mereka untuk berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan harapan mereka bersama. Kewenangan untuk menegakkan Hukum Hindu relevan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia (Qamar et al., 2016). Kewenangan lembaga Parisada melalui pengurus hariannya dapat melakukan langkah sesuai dengan pedoman dalam Lembaga Parisada yang diarahkan kepada seluruh masyarakat Hindu untuk taat dan patuh pada perintah yang diberikan oleh lembaga Parisada, karena perintah yang dilakukan oleh pengurus Parisada juga berdasarkan pada ajaran agama dan *awig-awig* yang telah diciptakan oleh masyarakat sebagai sumber Hukum Hindu yang tetap mengacu pada sumber aslinya yaitu kitab suci Weda, Manawadharmasastra dan Bhagawadgita serta sastra Hindu lainnya.

Kewenangan lembaga Parisada telah ditentukan dalam kitab suci *Manawadharmasastra* terutama Buku XII pasal 110 yang menyatakan bahwa, Apapun Parisada itu, setidaknya-tidaknya terdiri atas sepuluh atau tiga orang yang mengikuti jabatan mereka yang sesuai dinyatakan sebagai hukum, kekuatan yang sah itu tidak seorangpun yang harus membantahnya (Pudja & Sudharta, 2010). Berdasarkan pasal inilah lembaga Parisada mempunyai kewenangan untuk menegakkan Dharma atau Hukum Agama Hindu demi terciptanya ketentraman, kedamaian serta keadilan yang diberikan berdasarkan Hukum Hindu. Kewenangan lembaga Parisada dalam penegakan Hukum Hindu sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan perintah dari kitab Manawadharmasastra untuk menegakkan Hukum Hindu. Parisada memiliki kewenangan untuk menegakkan Hukum Hindu

dengan terjun langsung apabila ada permasalahan yang memerlukan penyelesaian melalui Banjar Adat belum mencapai putusan dalam penyelesaiannya.

Kewenangan lembaga Parisada untuk menegakkan Hukum Hindu dan kemanfaatan hukum yang ditegakkan merupakan langkah yang dapat ditempuh oleh pengurus Parisada untuk menciptakan ketentraman, kedamaian dan keadilan yang dibutuhkan oleh masyarakat Hindu untuk menciptakan kesejahteraan dan perilaku sosial yang beradab (Nainggolan, 2015). Ketentraman dan kedamaian sebagai harapan yang diinginkan masyarakat dan dapat diwujudkan dengan cara memenuhi segala aktivitas masyarakat dengan tetap memperhatikan pedoman dan anjuran yang ada pada ajaran agama Hindu. Masyarakat Hindu dimanapun berada termasuk di kecamatan Basarang menginginkan adanya ketentraman dan kesejukan hidup bersama dengan mengharapkan pengurus lembaga Parisada dapat menjadi panutan dengan kewenangannya agar pengurus dapat membuktikan kepeduliannya terhadap umat terutama menyangkut permasalahan yang dihadapi masyarakat apabila penyelesaian melalui lembaga banjar adat tidak dapat diselesaikan dan disinilah lembaga Parisada memiliki kewenangan sesuai pedoman yang ada dalam kitab *Manawadharmasastra* untuk membantu menyelesaikan masalah dengan memediasi kedua belah pihak agar menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Seperti kasus perceraian yang diselesaikan oleh lembaga Parisada setelah mendapat rujukan dari Kelian Adat untuk mendampingi menyelesaikan kasus perceraian dalam tahap pertama agar kedua belah pihak yang bercerai dapat rujuk kembali selama tiga kali disarankan untuk berdamai, apabila dalam tiga bulan tidak bisa rukun maka dilanjutkan ke tahap ke dua yaitu sidang adat dengan proses pemanggilan kedua belah pihak, pemanggilan saksi-saksi untuk menyampaikan keterangan dalam sidang adat sampai pada tahap ke empat yaitu keputusan sidang adat.

Kewenangan inilah yang memberikan jalan kepada pengurus Parisada sebagai jalan tengah dalam menghadapi permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Memperhatikan penjelasan tersebut strategi dalam penegakan Hukum Hindu dilakukan dengan pendekatan perlindungan dan keamanan. Perlindungan dan rasa aman diberikan kepada warga masyarakat dengan memberikan pedoman merujuk pada anggaran dasar PHDI.

3. Strategi Lembaga Parisada Dalam Penyelesaian Masalah

Masyarakat Hindu dimanapun berada sepanjang menjalankan aktivitas sudah tentu menghadapi masalah sosial terutama diluar kemampuannya untuk mengadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Mengingat kebutuhan dan kepentingan yang begitu kompleks dan majemuk memungkinkan akan terjadi pergesekan kepentingan yang berimbas kepada masalah yang berlarut-larut. Masyarakatpun menginginkan masalah yang dihadapi tentu cepat bisa diatasi, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian warga masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai (Sukidin & Chrysoekamto, 2011). Penyelesaiannya dilakukan melalui kelihan adat yang diselesaikan secara musyawarah, apabila masalah belum dapat diselesaikan maka kelihan adat mengundang lembaga Parisada untuk ikut dalam penyelesaian masalah tersebut. Musyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam penyelesaian perselisihan perlu didahului adanya itikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara atau semangat dari Majelis Permusyawaratan Adat. (Wulansari, 2018)

Pentingnya penyelesaian secara musyawarah agar tidak terjadi konflik yang berkepanjangan, dimana dalam musyawarah tersebut lembaga Parisada sebagai mediator dalam penyelesaian masalah. Mediasi sangat perlu dilakukan sebagai agar

pihak-pihak yang bersengketa, melalui mediator dapat mencermati permasalahan, mengembangkan opsi-opsi mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan (Sudiarto, 2015). Penegasan Ketua Parisada dalam kewenangan lembaga Parisada dalam menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap Hukum Hindu menyelesaikan tingkat pelanggaran yang dilakukan, bila pelanggaran masuk ke ranah adat, maka Parisada sebagai mitra dalam penyelesaian masalah tersebut dengan memediasinya. Lembaga Parisada dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat Hindu di kecamatan Basarang memberikan harapan besar bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan tersebut untuk dapat diselesaikan dengan bijak. Penyelesaian masalah yang melibatkan lembaga Parisada sebagai penyelesaian akhir yang dilakukan setelah penyelesaian secara adat tidak ada titik temu dalam penyelesaian tersebut. Kapasitas yang diberikan kepada lembaga Parisada sebagai upaya memediasi agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan. Sangat besar peran lembaga Parisada dalam pembinaan kehidupan masyarakat dalam sosial keagamaan apabila masyarakat mengalami permasalahan yang belum bisa diselesaikan secara adat, maka peran lembaga Parisada setelah dimintakan oleh lembaga adat untuk ikut serta menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Parisada ikut serta penyelesaian masalah dimana posisi Parisada membantu lembaga adat dalam memediasi permasalahan yang ada setelah lembaga adat tidak dapat menyelesaikan masalah yang ditangani, lembaga Parisada sebagai tingkat terakhir dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Lembaga Parisada dengan strategi penerapan keseimbangan kepada masyarakat Hindu untuk memberikan pengayoman dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada masyarakat Hindu agar masyarakat dapat hidup dengan tentram tanpa adanya rasa ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam hidup bermasyarakat. Yang paling penting adalah untuk menjaga keharmonisan, keserasian khususnya

terbentuk kerukunan umat beragama sehingga terbentuk dan terwujudlah hubungan yang toleran diantara umat beragama. Strategi lembaga Parisada dalam pengayoman dan perlindungan termasuk dalam perlindungan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat Hindu, sehingga peran lembaga Parisada terhadap penegakan Hukum Hindu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanah yang tertera dalam *Manawadharmasastra*. Lembaga Parisada wajib menegakkan Hukum Hindu agar tercipta kehidupan yang tentram tanpa adanya pergesekan apalagi bentrokan yang berlarut.

Lembaga Parisada kecamatan Basarang setelah mendapatkan pelimpahan masalah dari lembaga adat untuk diselesaikan, maka posisi lembaga Parisada berada di depan untuk menangani masalah tersebut. Penyelesaian masalah yang dilimpahkan kepada lembaga Parisada, maka lembaga Parisada memiliki peran dan kewenangan untuk menangani masalah yang terjadi, dengan hak bicara lebih besar pada Parisada. Dalam penyelesaian masalah tersebut tentu adanya akibat ketidakseimbangan skala niskala sehingga keputusan yang dikeluarkan disesuaikan dengan tingkat kesalahan serta disertai sanksi ritual bila permasalahan di ranah adat untuk disucikan seperti pelaksanaan *mecaru* atau *menyanggar* di lingkungan sekitarnya. Strategi dalam penyelesaian masalah dilakukan dengan cara memutus perkara dengan pertimbangan. Pertimbangan dilakukan agar tercipta rasa aman, rasa adil dan rasa persaudaraan.

IV. Penutup

Strategi Lembaga Parisada dalam penegakan Hukum Hindu di tengah interaksi sosial di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas adalah dilakukan dengan cara pendekatan secara organisasional dengan menunjukkan perannya sebagai lembaga pembina dan pengayom umat dengan kewenangannya untuk menegakkan hukum

Hindu dengan batasan pada Anggaran Dasar Parisada Provinsi dan Parisada Pusat. Pengaturan Hukum Hindu yang diterapkan pada masyarakat Hindu di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas pada semua aktivitas masyarakat Hindu merujuk pada Hukum Hindu yang disebut dengan *awig-awig*. Pengaturan dalam perkawinan, pengaturan dalam yadnya pengaturan dalam perceraian, pengaturan dalam pewarisan dan masalah lainnya diatur dengan awig-awig sebagai sumber Hukum yang bersumber dari Weda dan Manawadharma sastra.

Strategi lembaga Parisada dalam menyelesaikan masalah pelanggaran terhadap hukum Hindu, apabila pelanggaran masuk ke ranah adat, maka Parisada sebagai mitra Kelihan Adat dalam penyelesaian masalah dengan memediasinya. Apabila dalam penyelesaian masalah Kelihan adat tidak dapat menyelesaikan, maka permasalahan tersebut dilimpahkan kepada Parisada untuk menyelesaikannya dengan kewenangan berada di lembaga Parisada untuk menyelesaikannya sampai adanya putusan yang ditetapkan oleh lembaga Parisada dengan strategi yang dilakukan memutus perkara dengan pertimbangan hukum Hindu.

Daftar Pustaka

- Adi, R. (2016). *Sosiologi hukum: kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Hikmawati, F. (2019). *Metodologi Penelitian*. RajaGrafindo Persada.
- Jacky, M. (2015). *Sosiologi konsep, teori, dan metode*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kastama, I. M. (2020). Social Behavior Of Hindu Community In Enforcement Of Banjar Adat Activities In Sidorejo Village Of Tamban Catur Sub-District Of Kapuas Regency. *Belom Bahadat*, 10(01), 40–57.
- Kurnia, T. S. (2016). *Sistem hukum Indonesia: sebuah pemahaman awal*. CV. Mandar Maju bekerja sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Kristen~....
- Nainggolan, J. (2015). *Energi hukum sebagai faktor pendorong efektivitas hukum*. Refika

Aditama.

- Nugroho, B. D. (2017). *Hukum perdata Indonesia: integrasi hukum Eropa kontinental ke dalam sistem hukum adat dan nasional*. Refika Aditama.
- Praja, J. (2014). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Pustaka Setia.
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2010). *Manawa Dharmasastra (Manu Dharmasastra)*. Surabaya: Paramita, edisi revi.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., & Rezah, F. S. (2016). *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Ritzer, G. (n.d.). *Sosiologi ilmu pengetahuan berparadigma ganda*.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 22.
- Sudiarto. (2015). *Negosiasi, mediasi, dan arbitrase: penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta.
- Sugiyono, S. (2010). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R\&D*. Alfabeta Bandung.
- Sukidin, & Chrysoekamto, R. (2011). *Memahami Ilmu Sosial*. Center For Society Studies (CSS).
- Suryono, A. (2020). *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*. Bumi Aksara.
- Wulansari, C. D. (2018). *Hukum adat Indonesia: suatu pengantar*. Refika Aditama.